



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG**

**DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Daftar Identifikasi Risiko Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Daftar Identifikasi Risiko Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

DAFTAR IDENTIFIKASI RESIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Nama Satker

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko-(Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Proses revisi yang berlarut-larut	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Perencanaan yang belum komprehensif	3	3	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembatasan Revisi POK maksimal sebulan sekali	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyampaikan Nota Dinas Revisi ke masing-masing Kabag	Nota Dinas	Sub Bag Perencanaan	5/1/2023
2	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Sulitnya mengklasifikasikan rincian belanja sesuai kode akun yang ada dalam DIPA	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Juknis terbit terlambat dan tidak mendetail	3	3	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Konsultasi melalui What's App dan Zoom Meeting	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyurati KPU RI	Surat	Sub Bag Perencanaan	2023-10-01
3	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih	Pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak teridentifikasi	Faktor eksternal	Pemilih di Lapas tidak membawa identitas kependudukan	2	3	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Sinkronisasi data pemilih lapas dengan Kemenkumham dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pembentukan TPS di lokasi khusus sesuai dengan PKPU 7/2022	Surat Izin Pembentukan TPS di Lapas Setempat	Sub Bag Datin	2023-12-20
4	Penetapan Peserta Pemilu	Isu Ketidakabsahan calon/pasangan calon	Faktor eksternal	Hoax dan Black Campaign	2	2	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi kepada banyak stakeholder	Perbaikan aspek material	Pengumuman dan Memberikan akses secara terbuka kepada publik	Pengumuman	Sub Bag Teknis	2023-11-25
5	Penetapan Peserta Pemilu	Kekurangan bukti, fakta-fakta, kronologis, dan argumentasi hukum yang kuat menghadapi gugatan penetapan parpol	Kelemahan SDM	Sulit mengumpulkan bukti karena tidak terdokumentasikan dengan baik	3	3	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Mengarsipkan dokumen	Perbaikan aspek SDM	Arsip kegiatan dilakukan sesuai klasifikasi arsipnya sehingga memudahkan untuk pengumpulan alat bukti	Arsip	Sub Bag Teknis	2023-04-10
6	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Pengisian dokumen syarat dukungan DPD yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak selesai.	Faktor eksternal	Calon dan Tim Tidak Teliti dalam menyiapkan dokumen	3	3	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi kepada Calon DPD secara intensif	Koordinasi dengan eksternal	Penyampaian perbaikan dokumen secara jelas dan lengkap untuk meminimalisir kesalahan pada tahap berikutnya	Lembar kerja	Sub Bag Teknis	2023-04-10

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko-(Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1
7	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Pertentangan terhadap perubahan kebijakan	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Perubahan kebijakan yang terjadi tiba-tiba	2	2	Rendah	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Diskusi dengan Atasan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut berlaku	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Membuat catatan terhadap perubahan kebijakan dan implementasinya	Catatan Khusus	Sub Bag Teknis	2023-11-25
8	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Pengisian data dan dokumen persyaratan DPR, DPD dan DPRD yang tidak lengkap	Faktor eksternal	Tidak semua calon mendapatkan pembekalan dari partai politik secara lengkap atau LO tidak menyampaikan hasil sosialisasi dengan baik	4	3	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi yang intensif dengan LO Parpol dan DPD	Koordinasi dengan eksternal	Memberitahukan rincian syarat calon di Grup What's App LO Parpol dan DPD	Bukti kirim dokumen	Sub Bag Teknis	2023-11-25
9	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Dualisme kepengurusan partai maupun dualisme dukungan (dukungan ganda).	Faktor eksternal	Adanya pengurus partai yang sama mengklaim memiliki SK kepengurusan namun berbeda dengan yang diterbitkan oleh Menkumham	3	2	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan partai politik	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati KPU RI terkait penegakan SK kepengurusan mana yang menjadi rujukan KPU di daerah	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-01
10	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Caleg terlibat masalah hukum	Kelemahan SDM	Adanya perbedaan pandangan terhadap syarat calon mantan narapidana atau terpidana dan sebutan hukuman	3	3	Tinggi	Perbaikan aspek SDM	Mengikuti Rakor dengan KPU RI	Perbaikan aspek SDM	Rakor dengan Bawaslu dan PN setempat tentang makna caleg yang bermasalah dengan	Laporan kegiatan	Sub Bag Teknis	2023-04-10
11	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Caleg masih menjabat jabatan publik	Faktor eksternal	SK pemberhentian atau proses pengunduran diri belum diurus oleh caleg	3	3	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan calon secara intensif	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Mendagri, Menpan-RB dan stakeholder lainnya agar tidak mempersulit bakal calon yang mengurus pengunduran dirinya	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-10
12	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Masukan/tanggapan masyarakat atas verifikasi calon pasangan minim	Faktor eksternal	Jarang mendapatkan masukan dari masyarakat	2	2	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi di berbagai jenis media	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan media sosialisasi	Laporan	Sub Bag Teknis	2023-08-01
13	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Pergantian foto atau kekeliruan foto calon anggota DPD dalam DCS atau DCT yang selanjutnya akan ditarik ke Surat Suara	Faktor eksternal	Calon dan Tim tidak mempersiapkan foto lebih awal	3	4	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pada saat sosialisasi agar tidak ada perubahan foto	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati kembali partai politik dan Calon DPD	Surat	Sub Bag Teknis	2023-11-10

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko-(Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1
14	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Isu ketidakterbukaan syarat pencalonan	Faktor eksternal	Adanya opsi Calon boleh tidak membuka CV nya ke publik	4	3	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan pentingnya biodata calon agar lebih dikenal oleh pemilih pada saat sosialisasi kepada partai politik dan calon DPD	Koordinasi dengan eksternal	Menyurati Parpol dan Calon DPD tentang pentingnya membuka akses kepada publik terhadap biodata calon	Surat	Sub Bag Teknis	2023-04-10
15	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Digugat ke lebih dari satu lembaga pengawas/pengadil perkara pemilu (tumpang tindih)	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	UU mengakomodir penyelesaian sengketa pemilu di banyak kanal pengadilan	3	2	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyusun kronologis dan mendokumentasikan semua kegiatan yang ada	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Usulan revisi UU Pemilu	Draft UU Pemilu terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa	Sub Bag Teknis	2023-04-01
16	Pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kab/Kota	Dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak lengkap dan tidak sah.	Faktor eksternal	Partai politik tidak mensosialisasikan secara komprehensif kepada para calon	4	4	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Menekankan kepada partai politik agar jangan sampai menyampaikan syarat pencalonan di akhir waktu dan tidak	Koordinasi dengan eksternal	Surat kepada partai politik dan calon DPD	Surat	Sub Bag Teknis	2023-03-10
17	Masa Kampanye Pemilu	Sumbangan perseorangan, sumbangan badan usaha, sumbangan parpol kepada calon	Faktor eksternal	Calon kurang hati-hati dalam menerima sumbangan	3	5	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi ke Partai politik dan calon	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	Laporan kegiatan	Sub Bag Teknis	2024-03-01
18	Masa Kampanye Pemilu	Banyak dana kampanye tidak dicatat dan dilaporkan mempersulit audit oleh KAP	Faktor eksternal	Calon tidak mencatat transaksi sesuai waktu penerimaan dan	4	4	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi ke partai politik dan calon	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan dalam grup LO dan medsos resmi KPU	Laporan Kegiatan	Sub Bag Teknis	2024-03-01
19	Masa Kampanye Pemilu	Peserta Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal, beredarnya berita hoax di media sosial	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh	5	4	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-03-01
20	Masa Kampanye Pemilu	Hoaks dan disinformasi serta iklan kampanye di media sosial	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-03-01
21	Masa Kampanye Pemilu	Iklan kampanye yang dilakukan di luar jadwal, penggunaan ragam kategori	Faktor eksternal	Peserta Pemilu tidak patuh dengan aturan yang berlaku	5	4	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan Bawaslu dan Stakeholder	Laporan Kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-03-01
22	Masa Kampanye Pemilu	Pencatatan yang buruk atas dana kampanye	Faktor eksternal	Peserta Pemilu sering di akhir waktu penyampaian laporan baru mencatat	5	3	Ekstrem	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi	Koordinasi dengan eksternal	Mengingatkan terus peserta pemilu melalui grup	Surat	Sub Bag Parmas	2024-02-01
23	Masa Tenang	Kampanye terselubung, dengan modus sosialisasi cara memilih. Tim	Faktor eksternal	kurang pengawasan	3	2	Sedang	Koordinasi dengan eksternal	sosialisasi dengan berbagai stakeholder dan media massa	Koordinasi dengan eksternal	komunikasi intensif dengan parpol untuk tidak	Laporan tidak adanya kasus	Sub Bag Parmas	2023-01-11
24	Masa Tenang	Politik Uang	Kelemahan Material	rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara fair	3	4	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	pendidikan pemilu yang lebih ditekankan kepada kesadaran	Koordinasi dengan eksternal	sosialisasi tentang bahaya menerima	sosialisasi di media cetak dan	Sub Bag Parmas	2023-01-12
25	Masa Tenang	Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Regulasi tidak memuat sanksi tegas terhadap peserta pemilu yang tidak	3	3	Tinggi	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyampaikan surat himbauan untuk melakukan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Revisi PKPU tentang Kampanye dengan	DIM	Sub Bag Parmas	2023-01-11

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko-(Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1
26	Masa Tenang	Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Integritas petahana untuk tidak menggunakan fasilitas jabatan	4	3	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	socialisasi dengan forkompinda stakeholder	Koordinasi dengan eksternal	undangan sosialisasi	Laporan kegiatan	Sub Bag Parmas	2023-01-11
27	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterlambatan penetapan kebijakan	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Pembahasan RPKPU yang harus melalui Komisi II DPR dan stakeholder	4	5	Ekstrim	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Membahas rancangan kebijakan jauh sebelum kegiatan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyurati KPU RI tentang DIM yang akan ditemui nara	DIM dan Surat	Sub Bag Teknis	2023-02-01
28	Pemungutan dan penghitungan suara	Risiko Politik Uang Praktis/Serangan Fajar	Faktor eksternal	Sulitnya untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup	2	2	Rendah	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi dengan stakeholder	Koordinasi dengan eksternal	Meningkatkan metode sosialisasi dan koordinasi	Laporan	Sub Bag Parmas	2023-10-01
29	Pemungutan dan penghitungan suara	Kekurangan kertas suara dan logistik lainnya	Faktor eksternal	keterbatasan penyedia lokal untuk kebutuhan logistik yang mendesak	3	4	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Mendorong para calon penyedia tingkat lokal untuk ikut	Koordinasi dengan eksternal	Sosialisasi melalui media massa tingkat lokal	Bukti Iklan	Sub Bag Umlog	2023-10-10
30	Pemungutan dan penghitungan suara	Gambar calon dalam surat suara buram	Lainnya	Kurangnya pengawasan dari pihak eksternal dan internal	4	3	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Cetak ulang surat suara	Lainnya	Melakukan pengawasan berkesinambungan	Dokumentasi proses cetak surat suara	Sub Bag Umlog	2023-11-10
31	Pemungutan dan penghitungan suara	Keterlambatan pengiriman logistik Pemilu	Kelemahan Anggaran	Terbatasnya anggaran pengiriman logistik pemilu	4	5	Ekstrim	Perbaikan aspek anggaran	Ditambahnya alokasi anggaran logistik Pemilu	Lainnya	Cuaca yang tidak menentu untuk distribusi logistik	Dokumentasi Kondisi Dilanangan	Sub Bag Umlog	2023-11-10
32	Pemungutan dan penghitungan suara	Pembuatan TPS yang tidak aksesibel	Kelemahan Sarana Prasarana	Lokasi TPS yang tidak representatif	3	3	Tinggi	Perbaikan aspek sarana prasarana	Memastikan lokasi TPS tidak berada pada daerah rawan	Perbaikan aspek sarana prasarana	Surat koordinasi dengan Pemda setempat	Surat	Sub Bag UMlog	2023-11-10
33	Pemungutan dan penghitungan suara	Risiko keamanan TPS	Kelemahan Material	Lokasi TPS yang rawan bencana atau kerusakan	3	2	Sedang	Perbaikan aspek material	Memetakan lokasi yang rawan bencana dan kerusakan	Perbaikan aspek material	Memastikan adanya komunikasi dengan Pemangku Komunikasi	Laporan Pemantuan lokasi TPS	Sub Bag Umlog	2023-10-01
34	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Spesifikasi logistik yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Kelemahan SDM	Pengawasan yang tidak maksimal	2	4	Sedang	Perbaikan aspek SDM	Sudah ada SK Panitia Penerima Barang	Perbaikan aspek SDM	Bimtek Panitia Penerima Barang	TOR	Kabag KUL	01-02-2023
35	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Kekurangan volume pekerjaan	Faktor eksternal	Penyedia wanprestasi	3	4	Tinggi	Koordinasi dengan eksternal	Meminta kekurangan kepada penyedia	Koordinasi dengan eksternal	Mengoptimalkan pengawasan pada saat proses produksi	Laporan Pengawasan dan Kertas Kerja	Kabag KUL	01-10-2023
36	Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk PBJ Logistik)	Permasalahan pengadaan akibat pendelegasian proses pengadaan ke Satker KPU	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Metode yang tidak efektif	2	4	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	Memperbaiki metode sesuai dengan kondisi	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	Melaksanakan rapat koordinasi antar Satker	Dokumentasi Rapat	Kabag KUL	01-10-2023
37	Honor Badan AdHoc	Penyalahgunaan dana Pemilu Pembayaran berupa Honor PPK dan PPS, Biaya ATK PPK dan PPS dan	Kelemahan SDM	SDM tidak berintegritas	4	4	Ekstrim	Perbaikan aspek SDM	Pertanggungjawaban dana Adhoc yang sudah ditagih	Perbaikan aspek SDM	Bimtek Badan Adhoc	Laporan BIMTEK	Kabag HSDM	01-02-2023
38	Honor Badan AdHoc	Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi	Kelemahan Anggaran	Anggaran tidak memadai untuk digunakan	4	3	Tinggi	Perbaikan aspek anggaran	Merivisi Anggaran	Perbaikan aspek anggaran	Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Satker	RAB	Kabag Perencanaan	01-10-2023
39	Honor Badan AdHoc	Pertanggungjawaban BPP Adhoc belum diserahkan	Kelemahan SDM	BPP yang belum memiliki sertifikat kompetensi	3	2	Sedang	Perbaikan aspek SDM	Bimtek BPP Anggaran Adhoc	Perbaikan aspek SDM	Menunjuk BPP yang sudah bersertifikat kompetensi	Sertifikat BNT	Kabag KUL	01-11-2023
40	Dana Hibah	Proses pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK	Kelemahan metode kerja/prosedur/ kebijakan	Belum ada diatur dalam Keputusan KPU	3	2	Sedang	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Menyesuaikan dengan Kode Akun yang tersedia di RKAKL	Perbaikan metode/prosedur/ kebijakan	Koordinasi dengan KPU RI	Surat ke KPU RI	Kabag Rendatin	01-06-2023

No	TAHAPAN	RISIKO	Penyebab 1 (kategori)	Penyebab 1 (narasi)	Probabilitas (Saat Identifikasi)	Dampak (Saat Identifikasi)	Tingkat Risiko-(Saat Identifikasi)	Penanganan yang sudah ada 1 Saat Identifikasi (kategori)	Penanganan yang sudah ada 1 saat identifikasi (narasi)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (Kategori)	Penanganan Tambahan 1 yang Akan dilakukan (narasi)	Bukti Penanganan Tambahan 1	PIC Penanganan Tambahan 1	Jadwal Penanganan Tambahan 1
41	Dana Hibah	Risiko Lainnya yaitu Kegiatan oleh KPU dilaksanakan sebelum NPHD ditandatangani dan kegiatan Pengawasan yang melewati Tahun Anggaran tidak bisa dibiayai	Kelemahan Anggaran	Kegiatan tidak didukung dengan tersedianya Anggaran	3	2	Sedang	Perbaikan aspek anggaran	Menggunakan Anggaran Pribadi	Perbaikan aspek anggaran	Koordinasi dengan PEMDA untuk mempercepat proses pencairan dana hibah	Surat	Kabag Rendatin	01-01-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

tttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Aan Wuryanto